

How to capitalize a company: key considerations under Indonesian corporate law?

Nama: Aji Pangestu

NIM: 212040100049

Pendahuluan

Hal-hal yang didalam Buku Ajar Hukum Perusahaan tidak hanya terdapat satu materi yang telah dibahas dan yang telah dijelaskan, tetapi berbagai macam materi, dari cara pembuatan perusahaan dan sampai cara mengurus Perusahaan, dan bagaimana menjalankan Perusahaan sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Dengan begitu kita diajarkan untuk selalu tau karakteristik dan definisi dari Perusahaan itu sendiri, dan Perusahaan tidak hanya satu jenis, tetapi berbagai banyak jenis Perusahaan yang tercipta atas kerja sama kedua individu, seperti halnya melakukan kerja sama atau perjanjian maka juga mengakibatkan keuntungan secara pribadi atau keuntungan dalam lingkup Perusahaan.

Buku ini juga telah memberikan pengetahuan kepada orang awam yang minimnya tentang hukum dalam lingkup perusahaan. Dan kebanyakan orang melakukan usaha tidak tahu dengan dimulai dari langkah mana, dengan begitu akan menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Oleh karena itu masyarakat harus mempelajari dahulu secara mendalam sebelum melakukannya agar tidak terjadi kerugian.[1]

Tahap 1

Penetapan Tujuan Perusahaan

Variabel kepercayaan interpersonal menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja karyawan Anda, karena kinerja organisasi dapat dicapai ketika kepercayaan antar anggota masyarakat dapat meningkat. Kemudian, jika ingin menciptakan performance appraisal yang sukses, Anda harus menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya antar anggota organisasi. Adanya kepercayaan antar anggota organisasi dapat membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja. Variabel kepercayaan interpersonal bertindak sebagai variabel perantara yang secara tidak langsung mempengaruhi penetapan tujuan dan efektivitas manajerial. Ini memperjelas konteks untuk berpartisipasi dalam sistem pengukuran kinerja manajemen, tetapi diperumit oleh kendala anggaran/keuangan yang dimediasi oleh komitmen terhadap tujuan. Oleh karena itu perlu untuk memasukkan variabel partisipasi dalam sistem untuk mengukur efisiensi manajemen, diukur dalam hal partisipasi anggaran/keuangan dan non-anggaran/keuangan dalam pencapaian tujuan. Partisipasi juga memaksa manajer untuk meninjau tujuan, menerima komitmen dan bekerja menuju tujuan yang dapat dicapai yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja manajer. Sub-pemimpin dengan tujuan yang jelas tahu persis apa yang harus dilakukan dengan pekerjaannya, tetapi sub-pemimpin yang tujuannya abstrak tidak tahu, karena seorang pemimpin dengan tujuan yang jelas akan berusaha melakukan lebih banyak dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencapai tujuannya.

Sasaran yang ditetapkan adalah keterlibatan manajer dalam menetapkan sasaran kinerja dari perspektif anggaran/keuangan dan non-anggaran/keuangan. Sisi non finansial memperhatikan indikator yang tertinggal dalam jangka pendek dan jangka panjang dan merupakan perspektif non finansial yang paling dominan yaitu. H. fase internal proses bisnis seperti inovasi, pembelajaran dan pertumbuhan. Keseluruhan merupakan langkah dari hasil usaha sebelumnya dan langkah yang berkontribusi pada tindakan di masa depan. Misalnya, bawahan yang berinvestasi dalam pengembangan dan inovasi produk dengan tujuan jangka panjang memiliki kinerja bawahan yang dievaluasi berdasarkan keberhasilan aktivitas tersebut. Aspek keuangan dari penelitian ini mempertimbangkan fase pembiayaan tradisional. Alat akuntansi manajemen yang paling banyak digunakan dan terkenal, karena berfokus pada hal yang paling penting dalam ikhtisar profitabilitas organisasi. [2]

Tahap 2

Kepatuhan Hukum sebagai Perusahaan

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti berbicara tentang bagaimana hukum bekerja dengan mengatur dan/atau memaksa orang untuk selalu menaati hukum. Suatu hukum dapat menjadi efektif ketika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat beroperasi secara maksimal. Efektif tidaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat dilihat dari perilaku sehari-hari masyarakat. Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau diharapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka efektivitas hukum atau legislasi tercapai. Demikian pula, perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk pembayaran pajak tepat waktu, pelaporan keuangan, kepatuhan hukum ketenagakerjaan dan pertimbangan hukum terkait lainnya. [3]

Tahap 3

Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Perusahaan

Ikuti prinsip transparansi sehingga Anda memiliki akses informasi yang mudah, berbagi informasi dari atasan Anda kepada bawahan Anda, berbagi informasi yang dibutuhkan dan tidak membutuhkan akses baik di dalam maupun di luar perusahaan, berbagi informasi dengan organisasi lain, Perusahaan. proses pengambilan keputusan, adanya standar operasi perusahaan (SOP), tujuan staf peneliti dalam semua kegiatan operasional. Menurut peraturan KNKG (2006), yang menjelaskan bahwa transparansi mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi yang esensial dan penting dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh pemangku kepentingan. Transparansi yang lebih jelas dapat memberikan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Untuk hal-hal seperti pengiriman informasi, peserta penelitian mengirimkan informasi yang mudah didapat konsumen melalui situs web, dan pengiriman informasi ke organisasi lain dilakukan secara terbuka melalui papan buletin, surat, atau pertemuan. Selain itu, informasi orang dalam dapat dipertukarkan secara terbuka. Hal ini terlihat pada transmisi bertahap dari atasan ke bawahan, tetapi subjek menyampaikan informasi sesuai dengan batas dan haknya. Kemudian prinsip

transparansi juga terlihat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan melalui negosiasi dengan bantuan rapat, namun tetap melalui kebijakan pengelola, seperti yang dilakukan KNKG (2006) untuk menunjukkan bahwa perusahaan harus memenuhi persyaratan. hukum. dan peraturan, tetapi juga memperhatikan keputusan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya . [4]

Kesimpulan

Memanfaatkan perusahaan di bawah hukum korporasi Indonesia memberikan sejumlah manfaat penting yang hanya dapat diperoleh dengan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk perizinan, kewajiban perpajakan, dan persyaratan ketenagakerjaan. Memahami dan mematuhi ketentuan hukum korporasi yang berlaku sangat penting untuk menjaga kepatuhan dan kesuksesan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 2023. doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [2] Universitas Diponegoro, T. Akbar, S. A. Irwandi, and STIE Perbanas Surabaya, “Partisipasi Penetapan Tujuan Perusahaan sebagai Variabel Prediktor terhadap Kinerja Manajerial,” *JAMAL*, vol. 5, no. 2, Aug. 2014, doi: 10.18202/jamal.2014.08.5023.
- [3] E. Rosana, “KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT,” 2014.
- [4] “7736-14557-1-SM.pdf.”